



**Pelaksanaan Pengelolaan Kebijakan Alokasi
Dana Nagori (ADN) Dalam Meningkatkan Membangun Nagori di Kecamatan
Bandar Huluan Kabupaten Simalungun**

Meidina Laniari, Indra Muda Hutahut *

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area, Indonesia

Diterima Agustus 2016; Disetujui Oktober 2016 Dipublikasikan Desember 2016

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, memberikan gambaran pelaksanaan pengelolaan kebijakan Alokasi Dana Nagori dan mengetahui faktor penghambat pelaksanaan pengelolaan kebijakan Alokasi Dana Nagori di Kecamatan Bandar Huluan. Metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui observasi dan wawancara mendalam. Analisa data yang dilakukan dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Pengelolaan Kebijakan Alokasi Dana Nagori dalam Meningkatkan Pembangunan Nagori di Kecamatan Bandar Huluan Kabupaten Simalungun belum berjalan dengan efektif dikarenakan adanya faktor penghambat dalam pelaksanaannya yaitu kurangnya sumber daya manusia, sumber anggaran dan fasilitas/sarana dan prasarana.

Kata Kunci : Pengelolaan; Kebijakan; Pembangunan

Abstract

This research goals to analyze, give description about implementation of policy management Allocation Fund Village and identify factors inhibiting the implementation of policy management of the Allocation Fund Village in District Bandar Huluan. Methods used in this research is qualitative description by data collection techniques used observation and interview. Data analysis conducted by means of data collection, data reduction, data presentation and conclusion/verification data. The results showed that the Policy Management of the Implementation Allocation Fund Village to increase development in District Bandar Huluan, Simalungun has not been implemented effectively because there inhibiting factors in implementation are the lack of human resources, budget resources and facilities/infrastructure.

Keywords : Management; Policy and Development

How to Cite : Meidina Laniari, Indra Muda Hutahut (2016). Pelaksanaan Pengelolaan Kebijakan Alokasi

Dana Nagori (ADN) Dalam Meningkatkan Pembangunan Nagori di Kecamatan Bandar Huluan Kabupaten Simalungun 4 (2): 131-142

*Corresponding author:

E-mail: Indramudahutahut@yahoo.co.id

P-ISSN-2549-9165

e-ISSN

PENDAHULUAN

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa mengatur Penyelenggara Urusan Pemerintah Desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Bantuan Pemerintah Desa. Aturan tersebut diperkuat dengan adanya Peraturan Bupati Simalungun Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagori tahun Anggaran 2014 dalam pasal 1 ayat 21 mengatakan bahwa Alokasi Dana Nagori (ADN) adalah merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten, untuk Nagori minimal 10% atau sesuai kemampuan keuangan daerah yang pembagiannya setiap Nagori secara proposional.

Kabupaten Simalungun Desa disebut dengan istilah Nagori. Nagori itu sendiri mangacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Nagori. Dengan Perda tersebut menjelaskan bahwa Nagori adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada Nagori yang menjadi Kepala Pemerintahan Nagori adalah Pangulu. Sedangkan Sekretaris dan Kepala Urusan disebut dengan Tungkat Nagori. Untuk pimpinan wilayah bagian Nagori dilingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Nagori adalah Gamot. Untuk bagian wilayah Nagori disebut dengan Huta.

Melalui Alokasi Dana Nagori, nagori ataupun kelurahan berpeluang untuk mengelola pembangunan, pemerintahan dan sosial kemasyarakatan nagori secara otonom. Alokasi Dana Nagori adalah dana yang diberikan kepada nagori yang berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh

Kabupaten/Kota. Pemberian Alokasi Dana Nagori merupakan wujud dari pemenuhan hak nagori untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari nagori itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan peran pemerintah nagori dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memacu percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis. Alokasi Dana Nagori sangat penting guna pembiayaan pengembangan wilayah tertinggal dalam suatu sistem wilayah pengembangan. Pelaksanaan Alokasi Dana Nagori ini ditujukan untuk program-program fisik dan non fisik yang berhubungan dengan indikator perkembangan nagori, meliputi tingkat pendidikan, tingkat pendapatan masyarakat, dan tingkat kesehatan.

Alokasi Dana Nagori juga dimanfaatkan di hampir seluruh nagori dengan fokus pada pengembangan berbagai infrastruktur yang bersifat kemasyarakatan guna meningkatkan taraf hidup dan pendidikan masyarakat.

Kapasitas Aparatur Nagori sebagai pelaksana kebijakan menjadi faktor penunjang keberhasilan pelaksanaan program-program yang dibiayai ADN. Kemampuan dan keterampilan aparatur nagori sebagai pelaksana kebijakan merupakan dasar dari pelaksanaan pemerintahan khususnya di bidang keuangan dalam mengelola Alokasi Dana Nagori.

Kompetensi sumber daya manusia dalam diri pelaksanaan kebijakan ADN khususnya di bidang teknis kurang memadai berdasarkan survey awal yang penulis lakukan di Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun. Kondisi ini berdampak pada kurangnya efektifitas pelaksanaan program akibat perlunya pembiayaan terus menerus yang cukup membuang waktu yang dialokasikan.

Di sisi lain permasalahan yang muncul adalah kurang tepatnya pencapaian sasaran

program. Artinya program-program yang semula dianggarkan untuk dibiayai seringkali digantikan oleh program lain yang ternyata memiliki kepentingan yang lebih besar untuk diprioritaskan. Kondisi ini menggambarkan adanya mekanisme penganggaran yang kurang matang sehingga terjadi kesalahan dalam penentuan prioritas pandangan pada tahap awal. Indikasi awal yang menjadi dasar ketidaktepatan penentuan skala prioritas tersebut terletak pada kurangnya sosialisasi tentang kebijakan ADN sehingga kurang menyentuh pada masyarakat yang merupakan pelaksana langsung berbagai program yang didanai. Kurangnya sosialisasi berdampak pada kurangnya partisipasi masyarakat untuk memberikan usulan tentang program-program apa yang mendesak untuk dikedepankan guna didanai melalui ADN.

Mengenai hal tersebut tentunya akan memunculkan berbagai permasalahan yang sangat menarik untuk dikaji berkaitan dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Nagori. Sehingga kegiatan penelitian tentang masalah tersebut sangat penting untuk dilakukan, yaitu dengan melakukan penelitian untuk mengamati dan mencermati proses pengelolaan Alokasi Dana Nagori yang selama ini dilaksanakan agar dapat mengetahui apakah sudah sesuai dengan peraturan yang ada tentang pelaksanaan Alokasi Dana Nagori.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian kualitatif menurut Lexy J. Moleong (2007: 6) adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll. Secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang mana peneliti akan

mendeskripsikan penelitian ini secara menyeluruh dengan menganalisis fenomena, peristiwa, sikap, pemikiran dari orang secara individu maupun kelompok, baik yang diperoleh dari data wawancara. Peneliti mendeskripsikan tentang bagaimana Pelaksanaan Pengelolaan Kebijakan Alokasi Dana Nagori di Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun, dengan maksud memahami realita yang ada.

Penelitian kualitatif bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat atau kepercayaan orang yang diteliti dan kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*), Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Camat Bandar Hulan, dimana pemilihan lokasi ini dilakukan secara "*purposive sampling*" yaitu pemilihan lokasi atau obyek penelitian secara sengaja dengan beberapa pertimbangan tertentu. Adapun waktu penelitian dilakukan pada tahun 2015.

Dalam penelitian kualitatif, hal yang menjadi bahan pertimbangan utama dalam pengumpulan data adalah pemilihan informan. Dalam penelitian kualitatif tidak digunakan istilah populasi. Teknik sampling yang digunakan oleh peneliti adalah *purposive sample*.

Purposive sample adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2009:85). Selanjutnya menurut Arikunto (2010: 183) pemilihan sampel secara *purposive* pada penelitian ini akan berpedoman pada syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut: (1) pengambilan sampel harus didasarkan atas ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu, yang merupakan ciri-ciri pokok populasi, (2) subjek yang diambil sebagai sampel benar-benar merupakan subjek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat pada populasi (*key subjectis*). Penentuan

karakteristik populasi dilakukan dengan cermat di dalam studi pendahuluan.

Menurut Suyanto (2005: 171) proses penelitian pada informan penelitian ini meliputi beberapa macam yaitu :

- Informan Kunci : Camat Bandar Huluan.
- Informan Utama: Kepala PMN (Pemberdayaan Masyarakat Nagori)
- Pangulu di Nagori Kecamatan Bandar Huluan.
- Informan Tambahan : Masyarakat Nagori, Sekretaris Desa/Nagori.

Pada penelitian kali ini peneliti memilih jenis penelitian kualitatif maka data yang diperoleh haruslah mendalam, jelas dan spesifik. Selanjutnya dijelaskan oleh Sugiyono (2009: 225) bahwa pengumpulan data dapat di peroleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, dan gabungan/triangulasi. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara (a) observasi, yaitu: melakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian dan pencatatan hal-hal yang terjadi secara sistematis terhadap fenomena-fenomena atau gejala-gejala yang diteliti, (b) wawancara, yaitu : merupakan suatu metode pengumpulan data yang bersifat luwes, susunan pertanyaannya dan susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat di ubah pada saat wawancara, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat wawancara, termasuk karakteristik sosial-budaya (agama, suku, gender, usia, tingkat pendidikan, pekerjaan, dsb.) responden yang dihadapi. Dengan demikian, proses analisis data pada penelitian ini meliputi tiga langkah, yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan pengambilan kesimpulan/verifikasi, lebih jelasnya adalah sebagai berikut:

1. Reduksi data, yaitu untuk memilih data yang relevan dan bermakna, memfokuskan data yang mengarah untuk memecahkan masalah, penemuan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kemudian menyederhanakan dan menyusun secara sistematis dan

menjabarkan hal-hal penting tentang hasil temuan dan maknanya. Pada proses reduksi data hanya temuan data atau temuan yang berkenaan dengan permasalahan penelitian saja yang direduksi. Sedangkan kata yang tidak berkaitan dengan masalah penelitian di buang. Dengan kata lain reduksi data digunakan untuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan dan membung yang tidak penting, serta mengorganisasikan data, sehingga memudahkan peneliti untuk menarik kesimpulan.

2. Penyajian data, yaitu dapat berupa tulisan atau kata-kata, gambar, grafik dan tabel. Dengan tujuan untuk menggabungkan informasi sehingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi. Dalam hal ini agar peneliti tidak kesulitan dalam penguasaan informasi baik secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari hasil penelitian, maka peneliti harus membuat naratif, matrix atau grafik untuk memudahkan penguasaan informasi atau data tersebut. Dengan demikian peneliti dapat tetep menguasai data dan tidak tenggelam dalam kesimpulan informasi yang dapat membosankan.
3. Penarikan Kesimpulan/verifikasi, yaitu dilakukan selama proses penelitian berlangsung seperti halnya proses reduksi data, setelah data terkumpul cukup memadai maka selanjutnya di ambil kesimpulan sementara dan setelah data benar-benar lengkap maka diambil kesimpulan akhir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wilayah penelitian merupakan hal yang diperlukan untuk memberikan pendalaman pemahaman mengenai permasalahan yang akan diteliti lebih lanjut. Berikut ini akan diberikan gambaran mengenai wilayah Kecamatan Bandar Huluan Kabupaten Simalungun.

Kecamatan Bandar Huluan sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Simalungun yang memiliki luas 102,35 Km² dengan letak administrasinya sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Bandar Masilam, sebelah selatan dengan Kecamatan Gunung Maligas dan Gunung Malela, sebelah Barat dengan Kecamatan Dolok Batu Nanggar dan sebelah Timur dengan kecamatan Pematang Bandar.

Letak kecamatan Bandar Huluan di atas permukaan laut adalah 26-100 meter dimana pada ketinggian 26-50 meter seluas 2.250 Ha dan ketinggian 51-100 meter seluas 7.985 Ha dari keseluruhan luas wilayah yang berada pada ketinggian 0-100 meter di atas permukaan laut seluas 10.235 Ha.

Menurut kemiringan/kelerengan tanah, luas wilayah kecamatan Bandar Huluan terdapat pada lahan yang kemiringannya 0-2° seluas 9.550 Ha dan 2-15° seluas hanya 685 Ha.

Tabel 4.1 Proporsi Wilayah Menurut Kemiringan Lahan

Kemiringan	Luas (Ha)
0 - 2 %	93,31
2 - 15 %	6,69

Sumber : Profil Kecamatan Bandar Huluan Tahun 2014

Kecamatan Bandar Huluan mencakup 10 nagori/desa dan belum memiliki kelurahan, dimana 1 Nagori berstatus swakarsa, dan 9 lainnya telah berstatus swasembada dengan ibukota kecamatan adalah Nagori Naga Jaya I. Setiap Nagori membawahi dusun sebagai lingkungan administrasi terkecil dimana jumlah dusun terbanyak ada Nagori Naga Jaya yaitu 16 dusun disusul oleh Nagori Bandar Tongah 15 Dusun, selanjutnya, Nagori Bah Gunung memiliki 5 dusun, Nagori Dolok Parmonangan memiliki 10 dusun, Nagori Naga Jaya II memiliki 8 dusun, Nagori Tanjung Hataran memiliki 8 dusun, Nagori Bandar Betsy I memiliki 5 dusun, Nagori Bandar Betsy II memiliki 5 dusun dan nagori Naga

Sopa memiliki 4 dusun dan paling sedikit ada di Nagori Laras yang hanya terdiri 3 dusun.

Menurut Peraturan Bupati Simalungun Nomor 4 Tahun 2009 tentang rincian tugas, fungsi tata kerja pada organisasi kecamatan pemerintah kabupaten simalungun, bahwa tata kerja dan hubungan kerja organisasi kecamatan telah ditetapkan pada pasal 12 dan 13 yang berisikan :

PASAL 12

Camat melakukan koordinasi dengan kecamatan disekitarnya dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

Camat mengkoordinasikan unut kerja di wilayah kerja pemerintahan untuk meningkatkan kinerja kecamatan.

Camat melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintahan kabupaten dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintah di kecamatan.

Lurah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya melakukan koordinasi dengan camat dan instansi yang berbeda di wilayah kerjanya.

PASAL 13

Hubungan kerja Kecamatan/Kelurahan dengan perangkat daerah kabupaten simalungun bersifat koordinasi fungsional dan teknis operasional.

Hubungan kerja Kecamatan/Kelurahan dengan instansi di wilayah kerjanya bersifat kooordinasi teknis fungsional.

Hubungan kerja Kecamatan/Kelurahan dengan swasta, lembaga swadaya masyarakat, partai politik dan organisasi kemasyarakatan lainnya di wilayah kerja Kecamatan/Kelurahan bersifat dan fasilitas.

Visi Kecamatan Bandar Haluan yaitu : "Menciptakan Bandar Huluan menjadi daerah yang mandiri, aman serta meningkatkan kesejahteraan rakyat". Makna dari kalimat di atas dapat diartikan sebagai daerah yang mandiri, masyarakat yang berkemampuan melaksanakan potensi dan prakara sendiri, daerah yang aman, yaitu memiliki suasana kondusif, meliputi rasa aman dan nyaman dalam rangka keamanan dan ketertiban, kesejahteraan rakyat, yaitu masyarakat yang

mampu memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kualitas hidup secara layak.

Misi Kecamatan Bandar Haluan yaitu mewujudkan pemerintah yang profesional, bersih dan kreatif, meningkatkan dukungan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan, meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi dengan instansi terkait dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Struktur Organisasi Kantor Camat Bandar Haluan

Bantuan langsung Alokasi Dana Nagori adalah dana bantuan langsung yang dialokasikan kepada Pemerintah Nagori digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatan dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggung jawabkan oleh Pangulu selaku Kepala Pemerintahan Nagori.

Bantuan langsung Alokasi Dana Nagori dimaksudkan sebagai bantuan stimulant atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan.

Tujuan diberikannya bantuan langsung Alokasi Dana Nagori antara lain meliputi :

- (1) meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan nagori dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangan,
- (2) meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di Nagori dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta partisipatif sesuai dengan potensi yang dimiliki,
- (3) meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa dalam rangka pengembangan sosial ekonomi masyarakat,
- (4) mendorong peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat.

Penggunaan bantuan langsung Alokasi Dana Nagori (ADN) di bagi menjadi 2 (dua) komponen dengan ketentuan sebagai berikut :

Sebesar 30% dari besarnya ADN yang diterima oleh masing - masing Nagori, digunakan untuk Biaya Operasional Pemerintah Nagori/Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Sebesar 70% dari besarnya ADN yang diterima oleh masing - masing Nagori digunakan untuk membiayai kegiatan pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan bantuan langsung Alokasi Dana Nagori (ADN) harus berpedoman pada prinsip - prinsip pengelolaan, yang meliputi :

Penyaluran dana harus langsung ditujukan kepada pengelola/penerima.

Rencana kegiatan dilakukan dengan tertib dan harus dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan baik secara teknis maupun administrasi. Pelaksanaan ADN harus sudah selesai pada akhir bulan desember tahun anggaran yang sudah berjalan.

Apabila sampai akhir bulan desember belum dapat selesai atau belum mencapai 100% dan terdapat sisa dana, maka sisa dana tersebut di kembalikan ke kas Daerah. Hasil kegiatan/ proyek yang dibangun menjadi milik Desa /Nagori dan dapat dilestarikan serta dikembangkan oleh pemerintah Nagori dan masyarakat. Pengelolaan bantuan langsung Alokasi Dana Nagori dilaksanakan oleh Tim Pelaksana bantuan langsung ADN, terdiri dari:

- (1) Penanggung jawab Operasional kegiatan adalah Pangulu,
- (2) Penanggung jawab Administrasi Kegiatan adalah Sekretaris Desa,
- (3) Bendahara/Pemegang Kas adalah kepalaUrusan keuangan atau Bendahara Desa.

Apabila Pangulu dijabat oleh sekretaris desa, maka Sekretaris desa yang bersangkutan menjadi penanggung jawab operasional kegiatan, sedangkan penanggung jawab administrasi kegiatan dijabat oleh Kepala

urusan pembangunan desa/nagori yang bersangkutan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan pengumpulan data di lapangan, akan disajikan hasil penelitian melalui wawancara langsung dengan informan yang telah dipilih. Data yang diperoleh selama penelitian ini disajikan dalam bentuk analisis data yang di olah dari wawancara sehingga dapat diinterpretasikan dalam penyajian data. Data - data yang di peroleh penulis melalui data primer akan penulis sajikan dalam bentuk deskripsi sesuai dengan kenyataan di lapangan.

Penyajian Data Tentang Pelaksanaan Pengelolaan Kebijakan Alokasi Dana Nagori (ADN) di Kecamatan Bandar Hulan Berdasarkan Wawancara Kepada Informan (1) Ukuran dan tujuan kebijakan, yaitu meliputi kesesuaian program dan ketetapan sasaran apabila dibandingkan dengan rencana ADN yang telah ditentukan, sebagaimana hasil penelitian berikut ini :

Berdasarkan hasil wawancara berkaitan dengan kesesuaian program dengan kebijakan ADN, menurut Camat Bandar Hulan Bapak Pahot Halomoan, S.Sos. pada hari Senin, 23 Februari 2015 yaitu : *"Pelaksanaan ADN telah sesuai dengan kebijakan Bupati mengenai ADN, antara lain masing - masing Nagori harus bisa mengoperasikan dananya secara optimal sesuai dengan rencana kegiatan yang telah dibuat oleh masing - masing Nagori"*.

Pernyataan dari Pangulu Nagori Bandar Tengah Bapak Nasaruddin Damanik. Yang di wawancarai pada hari Selasa, 24 Februari 2015 yang mempunyai pernyataan yang senada sebagai berikut : *"Sudah sesuai dengan program kebijakan yang telah dibuat dengan daftar rencana kegiatan, karena Nagori kami telah memanfaatkan dana ADN untuk pembangunan jalan, membuat pembatasan jalan, pembuatan parit pasangan di dusun yang ada di dalam nagori, sisi jalan nagori dan pembuatan drainase"*.

Menurut Pangulu Nagori Bahgunung Bapak Darto yang di wawancarai pada hari Selasa, 24 Februari 2015, yang memberikan pernyataan yaitu : *"Memang bagi Nagori kami tidak semua kebijakan ADD kami laksanakan tetapi kami sesuaikan dengan kebutuhan, yang penting tidak bertentangan dengan kebijakan yang ada"*.

Pernyataan menurut pangulu Nagori Laras Bapak Sardi yang diwawancarai pada hari Selasa, 24 Februari 2015 yaitu : *"Semua yang kami lakukan untuk nagori kami yang untuk kebutuhan masyarakat yaitu dengan melakukan pembangunan di dalam nagori yang sesuai dengan rencana kegiatan yang dilakukan"*.

Sedangkan menurut pangulu lain yang ada di Kecamatan Bandar Hulan pernyataan mengenai kesesuaian program belumlah seperti apa yang telah ditetapkan dalam kebijakan tersebut. Adapun pernyataan yang terungkap dari Pangulu Naga Jaya I Bapak Adi Wijaya yang diwawancarai pada hari hari Selasa, 24 Februari 2015 *"Dana yang diberikan kepada nagori ini yaitu untuk pembangunan kantor pada tahun pertama yaitu tahun 2013 dan kemudian dibangun ruangan harungguan (balai desa), pada tahun 2015 direncanakan untuk membangun kantor maupun sarana dan prasarana kantor"*.

Senada dengan pernyataan oleh pangulu Nagori Naga Sopa Ibu Miswana Damanik yang diwawancarai pada hari Selasa, 24 Februari 2015 : *"Nagori kami dalam melakukan kegiatan pembangunan dengan dana ADN yaitu pada tahun 2014 lalu kami melakukan pembangunan prasarana kantor diantaranya adalah pembangunan pagar kantor, renovasi kantor"*.

Sumber daya manusia yang terdiri dari jumlah pegawai, tingkat pendidikan pegawai, keahlian, keterampilan dan kemampuan para pegawai untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Sumber anggaran yaitu sumber dan besarnya pembiayaan untuk melaksanakan kebijakan alokasi dana nagori tersebut. Fasilitas yaitu sarana dan prasarana

yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan alokasi dana nagori.

Beberapa orang yang terlibat langsung, fasilitas apa yang diperlukan dan berapa sumber anggaran yang diberikan untuk melakukan pelaksanaan kebijakan alokasi dana nagori. Lebih lanjut tentang sumber daya manusia itu disajikan dalam hasil penelitian berikut ini :

Terkait dengan kemampuan sumber daya manusia, menurut Camat Bandar Huluan yang diwawancarai pada hari Senin, 23 Februari 2015 menyatakan : *"memang pendidikan dari para pelaksana ADN sangat mempengaruhi kualitas pelaksanaan ADN. Ketika mereka kita ajak untuk diskusi tentang ADN tepat waktu, tepat mutu dan tepat administrasi mereka lambat untuk mengikuti, mklum saja pendidikan merekasebagian besar lulusan dari SMA"*.

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Nagori Laras yang di wawancarai pada hari Selasa, 24 Februari 2015 menyatakan : *"dengan kenyataannya pendidikan yang hanya SMA saya kesulitan dalam penyusunan rencana kgiatan yang baik, meskipun demikian dengan kemampuan dan hasil yang tidak maksimal kami dapat menyelesaikannya juga"*.

Demikian juga Kasi PMN (Pemberdayaan Masyarakat Nagori) Bandar Huluan yang diwawancarai pada hari Senin, 23 Februari 2015 menyatakan : *"Dengan mereka berpendidikan terakhirnya SMA, sehingga pelaksanaan ADN belum sesuai dengan standar kompetensi. Terkadang saya yang membantu mereka untuk membuat rencana kegiatan tersebut"*.

Terkait dengan masih rendahnya tingkat pendidikan dari berbagai pelaksanaan ADN di wilayah Kecamatan Bandar huluan tersebut adapun pernyataan yang dikatakan oleh Camat Bandar Huluan yang diwawancarai pada hari Senin, 23 Februari 2015 yaitu: *"Yang dibutuhkan masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Bandar Huluan adalah peran dari masing - masing*

Pangulu dalam mengajak bagaimana partisipasinya yang diberikan kepada masyarakat Nagori".

Mengenai anggaran Camat Bandar Huluan menyatakan yang diwawancarai pada hari Senin, 23 Februari 2015 yaitu : *"Anggaran itu sudah ada dalam APB Nagori Kecamatan Bandar Huluan yang dananya setiap masing - masing nagori mendapatkannya setelah mereka membuat rencana kegiatan"*.

Berkaitan dengan fasilitas - fasilitas yang mendukung kebijakan ADN, pada prinsipnya para informan menyadari bahwa permasalahan utama pelaksanaan ADN adalah kurang adanya dukungan dana dari pendapatan Nagori sendiri, sebagaimana pernyataan Camat Bandar Huluan yang diwawancarai pada hari Senin, 23 Februari 2015 yaitu : *"Dengan potensi yang minim dari setiap nagori sehingga tidak dapat menganalkan pendapatan dari kekayaan nagori tersebut"*.

Sementara itu ada salah satu Pangulu yang memberikan pernyataan mengenai dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan ADN yaitu Pangulu Bandar Tongah yang diwawancarai pada hari Selasa, 24 Februari 2015 : *"Dalam pelaksanaan ADN, ada masyarakat yang turut membantu pembangunan nagori seperti gotong royong ataupun swadaya masyarakat"*.

Ciri - ciri atau sifat/instansi pelaksana, yaitu meliputi struktur organisasi, pembagian tugas dan wewenang garis komando atau rentang kendali serta ketetapan atau kesesuaian pelaksanaan program dengan tingkat structural organisasi yang melaksanakan program tersebut.

Berkaitan dengan hal di atas berikut ini pernyataan Camat Bandar Huluan yang di wawancarai pada hari Senin, 23 Februari 2015 sebagai berikut : *"Dalam pelaksanaan ADN, yang memiliki peran untuk mengawasinya adalah BPD"*.

Komunikasi antar organisasi terkait dengan kegiatan - kegiatan pelaksanaan, yaitu komunikasi merupakan proses terjadinya

interaksi penyampaian pesan. Pengaruh komunikasi terhadap pelaksanaan adalah pada kejelasan dan isi pesan untuk dapat dipahami secara menyeluruh oleh penerima pesan atau program.

Terhadap pembentukan struktur organisasi pelaksanaan ADN sebagaimana disampaikan oleh Kepala Nagori Bandar Tongah yang diwawancarai pada hari Selasa, 24 Februari 2015 : *"Pihak kabupaten telah memberikan sosialisasi kepada kita tentang dana ADN yang akan diterima dan juga kami lakukan dengan petunjuk teknis penggunaannya. Pelaksanaan ADN memang sudah ada struktur organisasinya dan sudah di atur dan di bagi tugas dengan masing – masing para pelaksananya"*.

Pernyataan yang sama disampaikan oleh Kasi PMN Bandar Huluan yang diwawancarai pada hari Senin, 23 Februari 2015 yaitu : *"Semua Nagori telah membentuk organisasi pelaksanaan ADN sesuai dengan petunjuk teknis"*.

Terkait dengan pelaksanaan ADN disampaikan oleh Camat Bandar Huluan yang diwawancarai pada hari Senin, 23 Februari 2015 yaitu : *"Semua pangulu seharusnya mampu memanfaatkan dana ADN yang telah diberikan untuk membangun kepentingan masyarakat setempat seperti pembangunan jalan, jembatan, parit – parit drainase, dll"*.

Sedangkan Kasi PMN yang memberikan pernyataan diwawancarai pada hari Senin, 23 Februari 2015 yaitu : *"Seharusnya masing – masing pangulu benar – benar memanfaatkan dana yang telah diberikan kepada mereka, agar dapat membantu masyarakat dalam kehidupannya. Seperti halnya dalam pembuatan balai harungguan yang gunanya menampung masyarakat kalau adanya rapat anak rakyat, dan pembuatan pengerasan jalan dll. Karena semua itu kan sudah di buat dengan rencana kegiatan"*.

Sementara lain pangulu Nagori Bahgunung menyampaikan pernyataannya yang diwawancarai pada hari Selasa, 24 Februari 2015 yaitu : *"Kami memanfaatkan dana ADN*

yang sampai kepada nagori kami walau pun dana itu sedikit yang masuk, dan kami melakukannya sesuai dengan rencana kegiatan yang telah kami buat".

Pernyataan Camat Bandar Huluan mengenai kondisi sosial yaitu yang diwawancarai pada hari Senin, 23 Februari 2015 : *"Pada pelaksanaan ADN ini dana yang dikeluarkan dari Kabupaten berbeda – beda untuk setiap nagori, itu sesuai dengan banyak jumlah penduduk nagorinya"*.

Kasi PMN yang diwawancarai pada hari Senin, 23 Februari 2015 yaitu : *"Kondisi lingkup social, ekonomi dan politik pelaksanaan pengelolaan ADN sangat besar pengaruhnya, di mana pusat langsung mendistribusikannya kebijakan kepada daerah untuk menjalankannya, sehingga para pegawai terlibat langsung dalam pelaksanaan yang sedang berlangsung"*.

Dari uraian di atas, dapat diperoleh gambaran bahwa pengertian implementasi kebijakan dan faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi atau pelaksanaan belum sesuai/sejalan seperti apa yang dikatakan oleh Van Meter dan Van Horn (Meter dan Horn dalam Wahab, 2004) yaitu beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi adalah (1) ukuran dan tujuan kebijakan, (2) sumber – sumber kebijakan, (3) cirri-ciri atau sifat Badan/Instansi pelaksana, (3) komunikasi antar organisasi terkait dengan kegiatan – kegiatan pelaksanaan, (3) sikap para pelaksana, dan lingkungan ekonomi, social dan politik.

Faktor penghambat dalam Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Nagori (ADN) Kecamatan Bandar Huluan berdasarkan hasil wawancara mendalam kepada informan Camat Bandar Huluan Pahot Halomoan, S.Sos, Kasi PMN Bandar Huluan Nikmah Nasution, S.Sos, M.Si, dan para Pangulu di Kecamatan Bandar Huluan, dilakukan wawancara pada hari Senin, 23 Februari 2015 dan hari Selasa, 24 Februari 2015.

Adapun faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Nagori (ADN) Kecamatan Bandar Huluan adalah :

(1) kualitas sumber daya manusia pemerintah Nagori, (2) kualitas sumber daya manusia yang ada di semua Nagori Kecamatan Bandar Huluan sebagai faktor internal yang pada umumnya tergolong rendah. Penyebabnya di latar belakang oleh pendidikan dari aparatur pemerintah nagori yang ada tingkat nagori masih kurang, tetapi sebenarnya masalah ini dapat diatasi dengan memberikan bimbingan dan kesempatan untuk mendapatkan pelatihan. Kurangnya kemampuan yang dimiliki oleh perangkat nagori menyebabkan munculnya suatu masalah bahkan untuk mendistribusikan suatu masalah mengalami kesulitan.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan para informan bahwa koordinasi tidak dilakukan dengan baik di antara para pelaksana ADN, salah satu penyebabnya saling ketidakpercayaan diantara mereka dan melaksanakan tugas dengan sendiri - sendiri. Selain itu, selama pelaksanaan ADN di setiap nagori Kecamatan Bandar Huluan adalah keterbatasan dana sehingga dapat menyebabkan pembangunan yang ingin dilaksanakan terhambat. Setiap dana yang diberikan kepada masing - masing nagori itu sudah ditentukan oleh pemerintah Kabupaten dan jumlah dana tersebut berbeda - beda antara nagori yang satu dengan yang lainnya, dan berbeda pula jumlah dana yang dikeluarkan pada setiap tahunnya.

Adapun daftar dana yang di berikan kepada setiap nagori di Kecamatan Bandar Huluan sebagai berikut :

Tabel 4.2
Rekapitulasi ADN Kecamatan Bandar Huluan 2014

No	Nama Nagori	Jumlah Dana
1	Naga Jaya I	Rp. 34,110,900
2	Naga Soppa	Rp.

		36,826,400
3	Bandar Tongah	Rp. 35,195,900
4	Laras	Rp. 34,905,400
5	Bahgunung	Rp. 35,260,900

Sumber : Rekapitulasi ADN Kecamatan Bandar Huluan 2014 (diolah)

Menurut Santosa (2008: 347) Hal - hal yang harus diperhatikan dalam mekanisme penyaluran Alokasi Dana Nagori (ADN) sebagai berikut : (1) penyediaan dana untuk ADN beserta untuk pengelolaannya dianggarkan dalam ADN Nagori setiap tahunnya, (2) pengajuan ADN dapat dilakukan oleh pemerintah nagori apabila sudah ditampung dalam APBNagori yang ditetapkan dengan Peraturan Nagori, (3) mekanisme penyaluran secara teknis yang menyangkut penyimpanan, nomor rekening, transfer, Surat Permintaan Pembayaran, mekanisme pengajuan dan lain - lain di atur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku di daerah.

Dari pernyataan teori di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa teori yang menyatakan mengenai pencairan dana nagori kurang optimal, realisasinya pencairan dana nagori belum tepat waktu dan mengalami keterlambatan sehingga pelaksanaan pembangunan fisik yang direncanakan diperlukan perbaikan kembali dalam system dana negorinya agar dapat tepat sasaran penggunaannya.

SIMPULAN

Pelaksanaan Pengelolaan Kebijakan Alokasi Dana Nagori (ADN) dalam Meningkatkan Pembangunan Nagori di Kecamatan Bandar Huluan Kabupaten Simalungun belum berjalan dengan efektif. Hal ini disebabkan karena adanya hambatan-hambatan, seperti kualitas sumber daya

manusia yang rendah dipengaruhi oleh pendidikan yang masih kurang dari aparat pemerintah nagori sehingga pelaksanaan ADN belum optimal. Di samping itu hambatan yang kedua yaitu seperti keterbatasan dana yang di terima oleh masing-masing nagori. Hal ini disebabkan karena terhambatnya dalam melakukan pembangunan di daerah nagori untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan hambatan yang terakhir ialah koordinasi yang kurang baik hal ini disebabkan karena adanya ketidakpercayaan diantara para pelaksana kebijakan ADN dan melaksanakan tugas dengan sendiri-sendiri .

Pelaksanaan pengelolaan alokasi dana nagori merupakan salah satu upaya dalam pembangunan fisik nagori telah dilaksanakan yang diperuntukan penyentuan kebijakan secara langsung kepada masyarakat yang berwujud nyata berupa pembangunan fisik, infrastruktur dan pembangunan fisik lainnya yang berkaitan dengan fasilitas penunjang masyarakat agar akses kegiatan-kegiatan di nagori dapat berjalan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung. Alfabeta.
- Anynomeus. 2010. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ke-2. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Terjemahan)*. Yogyakarta. Gajah Mada. University Press.
- Fattah, Nanang 2004. *Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Dewan Sekolah*. Bandung : Pustaka Bumi Quraisy.
- Gaffar, Afan. 2009. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Gie, The Liang. 2000. *Administrasi Perkantoran*. Yogyakarta : Liberty.
- Islamy, M Irfan. 2009. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Cetakan ke-8 Jakarta. Bumi Aksara.
- Malayu, S.P Hasibuan. 2005. *Kepemimpinan Dan Perilaku Organisasi*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung. Rosda Karya.
- Nawawi, Ismail. 2000. *Public Policy, Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. Surabaya. PMN
- Nugroho, Iwan & Rochmin Dahuri. 2004. *Pembangunan Wilayah, Perspektif, Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*. Jakarta. Pustaka LP3ES.
- Qalyubi, Syahauddin. 2002. *Azas-Asas Manajemen*. Bandung. Alfabeta.
- Riyadi & Deddy Supriadi Bratakusumah. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Subarsono. A.G. 2005. *Analisis kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta. Pustaka Belajar.
- Sudjana. 2000. *Pengantar Manajemen Pendidikan Luar SEkolah*. Bandung. Nusantara Press.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta.
- Suharno. 2010. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik : Kajian, Proses dan Analisis Kebijakan*. Yogyakarta. UNY Press.
- Sunggono, Bambang. 2004. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Suyanto, Bagong. 2005. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- Tikson, T. Daddy. 2000. *Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang*. Jakarta. Gelora Aksara Pratama.
- 2005. *Administrasi Pembangunan*. Bandung : Alfabeta.
- Wahab, Solichin Abdul. 2008. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke*

Implementasi Kebijakan Negara. Edisi Ke2. Jakarta. PT. Bumi Aksara.

----- 2005. Analisis Kebijakan Publik. Jakarta. PT. Bumi Aksara.

Winarno, Budi. 2002. Kebijakan dan Proses Kebijakan Publik. Edisi Revisi. Yogyakarta. Media Presindo.

----- 2007. Teori Dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta. Media presindo.